

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Dwi Siti Lestari

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received January 12, 2023 Revised January 30, 2023 Accepted February 23, 2023 Available online February 23, 2023</p> <hr/> <p>*Corresponding author email : dwisiti494@gmail.com</p> <hr/> <p>Keywords: Unemployment, government policy, Covid 19</p>	<p>Introduction/Main Objectives: This research aims to find government policies for unemployment in Indonesia after Covid 19. Research Methods: The method used in this research is to wait for a qualitative approach with a research library. Finding/Results: The research results show that the government has implemented policies to address the unemployment problem in post-Covid-19 Indonesia, as follows; (1) Allocating funds for handling Covid-19. (2) Organizing income tax incentive programs and relaxing credit payments. (3) Provision of social assistance to 70.5 million informal sector workers who are included in the vulnerable and poor categories. (4) Conduct various competency and productivity based trainings. (5) Expanding job opportunities for workers affected by the pandemic. (6) Opening of consultation, information and complaint services for workers related to Occupational Safety and Health. (7) Issuance of Pre-Employment Cards to develop competency and job opportunities. Conclusion: The government has carried out the right policies to address the problem of unemployment in Indonesia after Covid-19</p>
<hr/> <p>Page: 12-19</p>	<hr/> <p>Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2023, the author(s)</p>

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 muncul pertama kali dengan ditemukannya 5 kasus pertama di kota Wuhan. Setelah ditemukannya 5 kasus pertama di wuhan, terus terjadi kenaikan pandemi COVID-19 setiap harinya di China dan memuncak di antara bulan Januari hingga awal

Februari 2020. Hingga November 2021 sudah lebih dari 255 juta kasus positif dengan lebih dari 5,12 juta korban yang meninggal dunia. Kasus awal terbanyak terdapat di Italia dengan kasus sebesar 86.498, kedua diikuti oleh Amerika dengan 85.228 kasus dan terakhir China sebanyak 82.230 kasus (Efriza, 2021). Corona virus atau sekarang lebih dikenal dengan Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia di Istana Negara 2 Maret 2020. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat Covid-19. Di minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh. Kedua pasien yang resmi dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan rumah sakit pada 13 Maret 2020, itu adalah kesembuhan pertama kali pengidap Covid-19 di Indonesia (Jalil & Kasnelly, 2020.)

Adanya pandemi covid19 memberikan dampak bagi bangsa Indonesia khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu sektor yang berdampak yaitu sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan suatu kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Paramita & Purbadharmaja, 2015). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 sebesar minus 5,32%". Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 akan bertumbuh dengan kisaran minus 2,9% sampai dengan minus 1,1%" (Fauzia, 2020). Oleh karena itu mengakibatkan meningkatnya Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Indonesia pada bulan Februari 2020 sampai bulan Februari 2021 mengalami peningkatan. Pada masa ini, Indonesia masih menghadapi Covid-19 yang jumlah kasus hariannya terus meningkat. Sedangkan pada bulan Februari 2021 masing-masing Provinsi di Indonesia bisa menurunkan angka pengangguran secara perlahan-lahan (Yuliyanti & Handayani, 2022).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka semakin baik kesejahteraan masyarakat karena terjadi adanya aktivitas ekonomi yang lancar, sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran bahwa efektivitas dan perkembangan perekonomian suatu negara dalam kondisi yang baik (Alghofari & Pujiyono, 2011). Namun faktanya terjadinya pandemi covid19 ini mengakibatkan sektor perekonomian negara melemah dan angka pengangguran semakin meningkat yang dapat mengakibatkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang akan dicapainya. Maka dari itu untuk mencapai kemakmuran terhadap masyarakat maka perlu tindakan agar segera tuntas masalah tersebut (Indriani & Ahmad, 2007). Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia pasca pandemic covid19.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Studi Kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan cara memperoleh teori, konsep, informasi, data dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedi, internet, dan sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (Labor Force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Rianda, 2020). Pengangguran salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Sedangkan menurut Sadono Sukirno Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur (Sudarmanto et al., 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Ibu rumah tangga, siswa sekolah dan sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan tidak termasuk dalam pengangguran (Dewita Hia, 2015).

Dilihat dari segi sebab timbulnya pengangguran dapat dibedakan kedalam beberapa jenis sebagai berikut: Pengangguran friksional atau transisi, Pengangguran struktural (*structural employment*), Pengangguran alamiah (*natural unemployment*), Pengangguran Siklis (Samoelson & Nordhaus, 1992) (Lopez, 2004). Adapun beberapa ciri dari pengangguran yaitu; Pengangguran Musiman, pengangguran ini dapat dicontohkan dengan buah mangga yang hanya berdagang pada saat musim mangga datang, atau petani ladang yang sedang vmenunggu musim panen tiba. Pengangguran Terbuka, pengangguran ini terjadi karena menipisnya lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan dan semakin meledaknya jumlah pencari kerja. Pengangguran Tersembunyi, pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada kenyataannya menyebabkan sistem kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan stabil. Setengah Menganggur, pengangguran ini terjadi tidak menentu dimana pekerja hanya bekerja kurang dari 1-4 jam per harinya (Utami et al., 2022).

Berikut ini beberapa faktor penyebab pengangguran: (1) Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. (2) Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja (Franita, 2016). (3) Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. (4) kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. (5) penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. (6) Kekakuan Tingkat Upah dan monopoli (Dongoran, 2016).

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang kopeten. Salah satu factor banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja

yang berkopeten. Budaya malas juga menjadi salah satu factor makin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia (Franita, 2016). Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran (Franita, 2016) adalah (1) memperlambat proses pembangunan, (2) meningkatkan angka kemiskinan, dimana tingkat pengangguran yang tinggi berdampak terhadap tingkat kemiskinan (Rosa et al., 2019), (3) Kesejahteraan menurun, (4) pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah berkurang, (5) Pertumbuhan ekonomi menurun (Zarkasi, 2014).

Kebijakan islam dalam mengatasi pengangguran menurut beberapa ahli yaitu; Memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Memberikan modal bagi mereka yang ingin mengembangkan skill yang di miliki untuk bekerja (Subhan, 2018). Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil (Humaira et al., 2022).

Pengangguran Di Indonesia Pasca Covid 19

Sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menurut BPS jika dihitung dalam 10 tahun terakhir yaitu pada bulan Februari 2010, angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tercatat sebesar 7,14% sedangkan pada bulan Februari 2020, angka TPT tercatat sebesar 4,99%. Angka tersebut dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Kemudian, setelah munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia, angka TPT pada bulan Februari sebesar 4,99% telah meningkat banyak menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada bulan Maret 2020 hanya dalam satu bulan. Menurut BPS pada bulan November 2020, angka TPT pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07% atau sebanyak 9,77 juta orang yang menganggur (Krisnandika et al., 2021b).

Dunia telah dilanda pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak ke tidak stabil dari segi perekonomian, politik, sosial dan budaya terutama di Indonesia yang rakyatnya masih banyak berstatus pengangguran. Suharso Bappenas memprediksi jumlah pengangguran akan bertambah terjadi 4,2 juta orang akibat pandemi ini. "Hitungan yang diperkirakan akan ada 2,3 –2,8 juta akan terjadi penciptaan lapangan kerja di 2021 berhadapan dengan pengangguran yang akan bertambah 4,2 juta pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya 2019. Adapun munculnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu penyebab bertambahnya angka pengangguran yang diprediksi melonjak hingga tahun depan. Kemnaker (kementerian ketenagakerjaan republik Indonesia) menyebut angka tersebut terdiri dari 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.221 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang (Farin, 2022).

Dampak Covid 19 Terhadap Pengangguran di Indonesia

Sejak di umulkannya secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia oleh presiden Joko Widodo di Istana Negara 2 Maret 2020, sampai sekarang jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini terus bertambah. Ternyata Covid-19 ini sangat memberikan dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian ditengah pandemic Covid-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemic Covid-

19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerja-pekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lock down dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatas sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur (Jalil & Kasnelly, 2020).

Hasil survey Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 224 juta jiwa. Perihal tersebut berarti, jumlah penduduk 2007 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 2010 maka jumlah penduduk Indonesia dapat dikatakan mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk dapat menimbulkan angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Kenaikan angka pengangguran diakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dengan adanya wabah coronavirus ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan. Sehingga, perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Perusahaan, pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non formal. Pekerja sektor formal merupakan mereka yang berusaha dibantu buruh tetap, dan mereka yang menjadi buruh, karyawan, dan pegawai. Sedangkan pekerja sektor non formal adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar pemutusan hubungan kerja tersebut berakibat kepada para karyawan, hingga para karyawan terkena dampak PHK yang harus kehilangan pekerjaannya dan dapat dikatakan pengangguran. Dikatakan pengangguran karena mereka mencari jalan keluar berupa pekerjaan lain sebagai alternatif dari pekerjaan sebelumnya. PHK yang dilakukan perusahaan kepada karyawan dilakukan untuk mengurangi jumlah beban yang ditanggung perusahaan saat kondisi pandemi. PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan dan terhadap puluhan bahkan hingga ratusan karyawan atau pegawai (Indayani & Hartono, 2020).

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Covid-19

Untuk menghindari efek pengangguran, pemerintah terus secara terus menerus mengatasi masalah pengangguran. (Sukirno, 2006) dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik, tujuan bersifat ekonomi terdiri dari: (1) menyediakan lowongan pekerjaan, (2) Menyediakan tarap kemakmuran masyarakat, (3) memperbaiki pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan bersifat sosial dan politik adalah: (1) meningkatkan kemakmuran keluarga dan kesetabilan keluarga, (2) menghindari masalah kejahatan, (3) mewujudkan kestabilan politik.

Selain itu ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pasca pandemi covid 19 antara lain yaitu ; (1) Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebanyak 46,6 Miliar dollar AS, dan juga stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebanyak 17,2 miliar dollar AS. (2) Mengadakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi

pembayaran kredit, dan secepatnya akan mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. (3) Pemberian bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang tergolong dalam kategori rentan dan miskin (Latifa & Pribadi, 2022). (4) Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19. (5) Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan. (6) Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan (Hanifa & Fisabilillah, 2021). (7) Penerbitan Kartu Pra-kerja untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja (Consuello, 2020) (Krisnandika et al., 2021a).

Menurut penelitian (Putri, 2019) Pada pelaksanaan program dan kegiatan masih mengalami hambatan karena kasus Covid-19 yang masih belum stabil. Pada kegiatan pelatihan hambatan yang dialami tidak terlalu berdampak pada pelaksanaan, karena kurangnya motivasi peserta pelatihan sehingga cara belajar akan berbeda seperti mudah memahami proses pelatihan atau sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi yaitu komunikasi yang sudah efektif namun masih ada para pencari kerja yang masih memilih-milih pekerjaan, sumberdaya yang ada belum memadai, sikap pelaksana sudah cukup baik, dan struktur birokrasi yang memiliki SOP cukup rumit. instansi yang lain juga masih kurang dan harus dikembangkan lagi. instansi yang lain juga masih kurang dan harus dikembangkan lagi. Selaras dengan hasil penelitian (Heriyanto n.d.2014) bahwa hambatan dalam implementasi strategi salah satunya adalah Koordinasi antar organisasi Kerja, yaitu koordinasi sebagai proses integrasi antara tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

KESIMPULAN

Pandemi covid19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah dan pengaguran semakin meningkat. Maka dari itu pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya yaitu ; (1) Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebanyak 46,6 Miliar dollar AS, dan juga stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebanyak 17,2 miliar dollar AS. (2) Mengadakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran kredit, dan secepatnya akan mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. (3) Pemberian bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang tergolong dalam kategori rentan dan miskin. (4) Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19. (5) Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan. (6) Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. (7) Penerbitan Kartu Pra-kerja untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja.

REFERENSI

- Alghofari, F., & Pujiyono, A. (2011). *Analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007* [PhD Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Consuello, Y. (2020). *Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19*. 4(1), 8.
- Dewita Hia, Y. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Dongoran, F. R. (2016). Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), Article 2. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/599>
- Eng Ahmad & Epi Indriani, 2007—Penelusuran Google*. (n.d.).
- Efriza, E. (2021). COVID-19. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(1), 60–68.
- Farin, S. E. (2022). Jatuhnya Perekonomian Akibat Pandemi Covid 19. *Tugas Mata Kuliah Mahasiswa*, 100–111. <https://doi.org/10.20527/tmkm.v1i1.43>
- Fauzia, M. (2020). Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 29 Persen, Siap-Siap Resesi. *Diakses Pada Tanggal*, 1.
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), Article 1. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97>
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Heriyanto, M. (2014). Implementasi Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 9-16. DOI <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v5i3.221> 8—Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved November 28, 2022, from
- Humaira, M., Batubara, M., & Yusuf, M. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Binjai Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4990>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Perspektif : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31294/jp.v18i2.8581>
- Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). *Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19)*. 16.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021a). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).

- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021b). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2229>
- Latifa, I., & Pribadi, F. (2022). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Mengatasi Pengangguran Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), 137–146. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v3i3.45781>
- Lopez, J. H. (2004). *Pro-growth, pro-poor: Is there a tradeoff?* (Vol. 3378). World Bank Publications.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Putri, A. F. (2019). Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Residu*, 3(20, Agustus), 25–33.
- Rianda, C. N. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>
- Rosa, Y. D., Agus, I., & Abdilla, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), Article 2.
- Sachs, J. D., & Larrain, B. F. (1993). *Macroeconomics in the global economy*.
- Samoelson, P. A., & Nordhaus, W. (1992). *Macroeconomics, Twelves Edition*. Mc Graw Hill Book Company.
- Sandono Sukirno, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,—Penelusuran Google. (n.d.).
- Subhan, M. (2018). Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i2.44>
- Sudarmanto, E., Rahmadana, M. F., Rozaini, N., Suleman, A. R., Basmar, E., Amruddin, A., Elistia, E., Yulfiswandi, Y., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Yayasan Kita Menulis.
- Syahrudin, S., & Mutiani, M. (2020). *Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi*. Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Yuliyanti, R., & Handayani, N. (2022). *Strategi Mengatasi Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19*. 8.
- Zarkasi, Z. (2014). Pengaruh Pengangguran Terhadap Daya Beli Masyarakat Kalbar. *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 4(1), 43–62.